

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kewargaan

Kewargaan dibentuk dan diperaktikan melalui serangkaian gerakan melawan ketidakadilan. Gerakan-gerakan ini berupa serangkaian perjuangan oleh rakyat di level akar rumput dan kelas menengah beserta organisasi perwakilan dan para aktivisnya untuk pengakuan kultural, keadilan ekonomi dan sosial serta representasi politik sesuai pendapat (Stokke dan Eric dan Risky, dkk 2018). Kewargaan berhubungan dengan warga atau keanggotaan di dalam kenegaraan atau juga didefinisikan sebagai salah satu anggota atau masyarakat yang berkaitan dengan sosial dalam mendapatkan hak dan perlindungan. Untuk itu sangat penting mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kewargaan. Kewargaan adalah merupakan konsep yang didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda dan selalu bertolak belakang dalam satu sama lain.

Umumnya kewargaan dikaitkan dengan hak-hak dasar warga Negara. Terhadap gerakan rakyat tersebut mendeskripsikan di mana keadaan keberagaman ketidakadilan dan posisi-posisi subjek di dalam masyarakat, yang mana pada saat bersamaan juga dipengaruhi oleh dinamika politik. Sebuah usaha yang penuh dikerjakan dengan kewargaan dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia berhubungan satu sama lain. Di tengah situasi bermacam-macam ketidakadilan, kolektivitas dan mobilisasi, dapat dikatakan bahwa representasi dan politik demokratis menjadi posisi yang paling penting dan utama untuk mengintegrasikan dan merubah hubungan-hubungan *antagonistic* dalam perjuangan-perjuangan populer yang terfragmentasi. Akan tetapi, hal ini membutuhkan sebuah demokrasi yang bukan hanya memiliki kontrol kedaulatan atas urusan-urusan publik, melainkan juga mempunyai saluran dan organisasi bagi representasi politik. Di Negara Indonesia, demokrasi formal yang ada belum menjalankan

semua kriteria ini. Oleh karenanya itu ada kebutuhan yang sangat mendesak agar mentransformasikan demokrasi itu sendiri, sekaligus menjadi cara untuk mentransformasikan struktur-struktur ketidakadilan dalam masyarakat. Pengembangan agenda transformatif, organisasi, dan strategi masih menjadi kebutuhan sekaligus tantangan dalam mewujudkan kewargaan di Indonesia.

2.2. Kedudukan, Hak dan Kewajiban

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyanggah kewargaan yaitu sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sama dengan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Pasal 27 yang berbunyi: Setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia, ini menandakan bahwa Negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran Mahasiswa dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Sampai saat ini fasilitas dan upaya untuk memberikan penjagaan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran kewargaan telah diatur didalam Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 1997 tentang kewargaan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur problem ketenaga kerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalulintas dan angkutan jalan, kereta api, pelayaran, penerbangan Namun demikian, dalam upaya penjagaan saja tidak cukup memadai kalau hanya dengan pertimbangan bahwa peningkatan, memajukan menambah dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa, dan hal ini membutuhkan fasilitas dan upaya lain terutama berkaitan dengan penyediaan sarana untuk

mendapatkan kesamaan kesempatan bagi hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.

Secara normatif, sebenarnya sudah ada beberapa instrumen hukum yang dilahirkan dalam rangka untuk mengamankan hak kewajiban untuk bekerja. Katakan saja UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan yang mengharamkan' diskriminasi Bahkan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat makin menegaskan hak itu. Pasal 14 UU No 4/1997 mewajibkan perusahaan negara dan swasta untuk menjamin kesempatan bekerja kepada para penyandang cacat. Bahkan dalam Penjelasan Pasal itu makin ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 100 orang wajib mempekerjakan satu orang penyandang cacat. Takmain-main Pasal 28 UU 4/1997 itu bahkan mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda paling besar Rp 200 juta bagi pelanggar Pasal 14.

Sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak warga Negara maka diperlukan sebuah penataan peratuaran yang dapat melindungi warga negara, untuk itu kami mengadakan Penelitian Hukum tentang Perlindungan hukum bagi warga Negara dan penelitian ini mendukung Agenda Nasional 2010-2014,dalam hal peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan dan Penghormatan, kemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan dari hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang hak dan kewajiban yang saat ini sudah termasuk daftar Prolegnas 2010 –2014.

2.3. Dimensi Kewargaan

T. H. Marshall (1950) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi yang menjadi elemen penting dari status menjadi warga Negara dari suatu Negara. Elemen-elemen tersebut antara lain: hak-hak sipil, hak politik, dan hak social.

2.2.1. Hak-Hak Sipil

Hak-hak sipil adalah hak-hak yang dibutuhkan untuk kemerdekaan, kebebasan pribadi kebebasan untuk berbicara, berpikir dan beriman, hak untuk memiliki harta, membuat kontrak yang sah, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hak *civil* tersebut merupakan hak warga Negara dalam menikmati kebebasan misalnya hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, mencari harta, hak bekerja, serta hak beragumen atau berpendapat baik secara lisan maupun tertulis dan hak memeluk agama.

2.2.2. Hak-Hak Politik

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap anggota masyarakat dalam mengikuti kegiatan berpolitik, misalnya melalui pemilihan umum. Dalam mengikuti atau partisipasi dalam berpolitik terdapat beberapa diantaranya Rush Althoff (2005:122) antara lain:

1. Menduduki jabatan politik
2. Mencari jabatan politik
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Partisipasi dalam diskusi politik informal atau nonformal
5. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi dan sebagainya
6. Pemberian suara dalam berpendapat

Gerakan dalam berpolitik mencakupi untuk berpartisipasi dalam melakukan tindakan atau pergerakan diruang lingkup oragnisais politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil

sebagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Menurut John Lock hak-hak politik mencakup universal dalam meningkatkan keharusan yang ada pada diri manusia, (*life, liberty and property*). hak berpolitik harus searah dengan tumbuhnya dan berkembangnya sistem Negara bangsa yang dilembagakan kedalam sistem parlementer. Berpolitik menyangkut pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung. Montesquieu kemudian menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*. Hak-Hak politik Meliputi:

1. Mendapatkan perlindungan baik ekonomi maupun pendidikan
2. Hak kebebasan untuk bebas berfikir berkeyakinan dan beragama
3. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
4. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
5. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
6. Hak menjabat dalam tata pemerintahan

Perwujudan hak *political* dapat dijelaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 terkandung dalam Pasal 28 yaitu: Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 peraturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24 dan

25

1. bahwa warga Negara bebas mempunyai keyakinan dalam berpolitiknya
2. setiap orang bebas untuk mempunyai mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani secara lisan atau secara tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dan kepentingan umum serta keutuhan Negara. Pasal 24

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul berapat dan berserikat untuk maksud kedamaian.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara berhak mendirikan organisasi didalam masyarakat atau organisasi lainnya dalam berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.2.3. Hak-Hak Sosial

Hak social yang mencukupi kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Setiap warga Negara memiliki hak untuk mengusahakan atau memperoleh kesejahteraan, berusaha dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari dimensi kewarganegaraan. Di Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan menjadi salah satu acuan hidup bernegara yakni, kesejahteraan bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

Menurut Zamudio, (2001) hak social adalah kewajiban antara individu dan dalam mendapatkan kebebasan. Hanya semua individu dan kelompok yang memenuhi persyaratan

sebagai warga Negara dalam suatu Negara yang akan memperoleh pengakuan formal dari negara. Individu atau kelompok yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dengan demikian tidak dapat diakui sebagai warga negara secara formal. Pelaksanaan kewarganegaraan (*citizenship exercise*) mengacu pada kondisi-kondisi penting untuk merealisasikan hak warga negara yang menghubungkan hak baru yaitu mentransformasi kebutuhan dalam hak yang sah. Elemen yang terakhir dari kewarganegaraan adalah kesadaran kewarganegaraan (*citizenship conscience*) yaitu menyangkut kepercayaan atau keyakinan seorang warga negara, dengan pengakuan warga yang diberikan dalam praktek konkrit dalam pelaksanaan identitas kewargaan.

2.4. Politik Kewargaan

Politik kewargaan berawal ketika sejumlah tokoh pergerakan nasional yang menuntut pengakuan dalam menghendaki distribusi kewargaan sebagai bagian dari konflik dan perjuangan politik. Turner dan juga Mann, melihatnya terutama dalam konteks perlawanan kelompok-kelompok sosial yang tertindas terhadap Negara dan kelas dominan. politik kewargaan dari atas dan kewargaan dari bawah yang diperkenalkan turner maka politik kewargaan di Indonesia selama kurang lebih satu abad ditandai oleh tarik menarik antara perlawanan dan konflik, umumnya politik kewargaan bermula dari tuntutan inklusi dan perlawanan antara kelas menengah dan sektor-sektor populis, Penguasa berupaya meresponya dengan regulasi kewargaan atau bahkan melakukan tekanan dengan persuasi untuk meredakan tuntutan dengan perlawanan.

Kewargaan di Indonesia tumbuh atau bahkan mengalami kemunduran berdasarkan tolak tarik dua proses ini yang cenderung bersifat dialektis dan dinamis ketimbang evolusioner sekalipun sistem bertahan tolak tarik tersebut yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pada level structural akibat faktor seperti dekolonisasi, modernisasi, dan globalisasi. Identitas

kewargaan Indonesia karenanya tidak bersifat universal dan merupakan agregasi perlawanan-perlawanan yang pada dasarnya bersifat independent dalam hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena tuntutan yang melandasi perlawanan terhadap gerakan perjuangan yang menjadi basis politik kewargaan dibentuk oleh alasan-alasan yang bersifat particular. Tampaknya politik kewargaan di Indonesia dipahami dengan tiga cara yaitu: *pertama* sebagai produksi dari tolak tarik menarik antara proses perlawanan intitusionalisasi dan regulasi versus perlawanan terhadap tuntutan dari bawah menegah. Cara pertama ini akan membantu dan akan melahirkan sejarah politik kewargaan di Indonesia seperti yang dilakukan Mann dan Turner. *Kedua* memperlakukan politik kewargaan sebagai proyek hegemoni yang tidak akan final dalam berkembang terhadap pola kekuatan masyarakat. *Ketiga* kewargaan dari bawah terhadap politik kewargaan juga ditandai oleh perbedaan ketegangan dan konflik antara kelompok dan gerakan dalam hal ini memaknai dan memahami kewargaan yang menekankan nasionalisme etnis dan nasionalisme modern. Kemudian kewargaan tumbuh dan berkembang artinya kewargaan tidak tumbuh secara berurutan tapi hampir selalu berkembang secara beriringan dan saling tumpah tindih. Selain itu perubahan politik kewargaan dan sosial mendasar yang terjadi dari waktu kewaktu dimulai sejak jaman gerakan kemerdekaan diawal abad ke 20 hingga masa-masa proklamasi kemerdekaan.

2.5. Konsep Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (IMM HMI Dan PMII)

2.5.1 Konsep Organisasi IMM

Ada sebuah landasan konsep IMM yang mendasar sebagai gerakan mahasiswa islam yaitu: QS. Al Imron: ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada allah swt. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka,

diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” penerjemahan ayat ini adalah sebagai sebuah dasar untuk merekonstruksi sebuah bangunan ideology IMM. Manusia di ciptakan sebagai *khalifah fi lard* tentu harus dipahami sebagai peran yang berat karena mempunyai tanggung jawab besar atas apa yang terjadi di bumi. Dan IMM harus bisa menjawab itu untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin sesuai perintah Al-Qur’an dan sunnah.

Konsep IMM dapat difungsikan untuk kepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Konsep IMM secara spiritual dapat menguatkan ghiroh, azam atau tekat bermuhammadiyah yang kuat dan ikhlas untuk mendapat ridha Allah SWT, dan tidak dapat digoyahkan oleh kekuasaan- kekuasaan yang semata-mata bersifat manusiawi.
2. Konsep IMM berfungsi untuk membentuk karakter kolektif yang bersih, yang sangat menentukan terwujudnya kolegiusitas yang kuat, nyaman dan damai dalam menggerakkan konsep IMM
3. Konsep IMM untuk menyusun, dan menerbitkan langkah-langkah strategi untuk menggerakkan Muhammadiyah dan IMM, seluruh amal usaha Muhammadiyah keempat, konsep IMM berfungsi dalam membentengi Muhammadiyah, dan setiap kader Muhammadiyah dan IMM dari berbagai pengaruh aliran pemikiran keagamaan yang sesat, ideology ekonomi, dan ideology politik yang bertentangan dengan islam.

namun sejatinya karena IMM adalah anak dari Muhammadiyah maka konsep IMM pun akan merujuk pada ideology Muhammadiyah, dengan Al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber ajaran, AD/ART Muhammadiyah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku dalam perserikatan sebagai landasan konstitusional, terhadap keperibadian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

2.5.2 Konsep Organisasi HMI

Hasil kongres HMI xxx Ambon, 14-25 februari 2018 Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi perkaderan yang bertujuan Terbinanya insan akademisi, pencipta, pengabdikan yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Swt. Berdasarkan tujuan tersebut HMI mempunyai landasan atau konsep sebagai berikut:

1. Dasar-Dasar Kepercayaan
 2. Dasar tentang kemanusiaan
 3. Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) Dan keharusan Universal (Takdir)
 4. Ketuhanan yang Maha esa dan Perikemanusiaan
 5. Individu dan Masyarakat.
1. Dasar-dasar kepercayaan

Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dalam waktu yang sama juga harus merupakan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya. Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Karena bentuk- bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada dua kemungkinan: kesemuanya itu salah atau salah satu saja diantaranya yang benar. Disamping itu masing-masing bentuk kepercayaan mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang campur baur. Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai.

nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradis-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya.

Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya guna perkembangan peradaban dan kemajuannya, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional, dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh yang merupakan kebenaran. Maka satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah swt. Perumusan kalimat persaksian (Syahadat) Islam yang kesatu: Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan "Tidak ada Tuhan" meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan "Selain Allah" memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai, itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam

2. Dasar tentang kemanusiaan

Manusia adalah puncak ciptaan, merupakan makhluk yang tertinggi dan adalah wakil dari Tuhan di bumi. Sesuatu yang membuat manusia yang menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu Fitrah. Seorang manusia sejati

(insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbezaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja.

3. Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) Dan keharusan Universal (Takdir)

Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni, kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari perkembangan tak terkekang daripada kemauan baiknya. Keikhlasan adalah gambaran yang terpenting dari setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu kemerdekaan harus diciptakan untuk pribadi dalam konteks hidup ditengah masyarakat. kemerdekaan adalah esensi atau dasar kemanusiaan, tidak berarti bahwa manusia selalu dan dimana saja merdeka. Adanya batas-batas dari kemerdekaan adalah suatu kenyataan. Batas-batas tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung kepada kemauan manusia. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya keharusan universal atau kepastian umum dan takdir (57:22).

4. Ketuhanan yang Maha esa dan Perikemanusiaan

kemerdekaan dan keikhlasan dan kemanusiaan. Tetapi jelas pula bahwa tujuan manusia hidup merdeka dengan segala kegiatannya ialah kebenaran. Oleh karena itu sekalipun tidak tunduk pada sesuatu apapun dari dunia sekelilingnya, namun manusia merdeka masih dan mesti tunduk kepada kebenaran. Karena menjadikan sesuatu sebagai tujuan adalah berarti pengabdian kepada-Nya. Oleh sebab itu seseorang manusia merdeka ialah yang ber-ketuhanan Yang Maha

Esa. Keiklasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata bertujuan kepada Tuhan YME, yaitu kebenaran mutlak, guna memperoleh persetujuan atau "ridho" daripada-Nya.

5. Individu dan Masyarakat

kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya dan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hak asasnya yang pertama. Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Juga telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentukbentuk hubungan tertentu. Maka dalam masyarakat diwujudkan karena adanya kemerdekaan pribadi itu maka timbul perbedaan-perbedaan antara suatu pribadi dengan lainnya, maka perbedaan-perbedaan itu adalah untuk kebaikannya sendiri: sebab kenyataan yang penting dan prinsip ialah bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural menghendaki dan mewujudkan masyarakat yang bermoral.

2.5.3 Konsep Organisasi PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang berawal dari akar kesejarahan yang didasarkan pada kondisi sosial politik tertentu. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sendiri dipilih karena memiliki dasar-dasar filosofi gerakan. Makna pergerakan berarti dinamika dari hamba yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan rahmat bagi alam sekitarnya.

Konsep Organisasi Mahasiswa PMII terbagi ada tiga adalah sebagai berikut:

1. Konsep PMII adalah merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah dari setiap anggota

PMII. PMII berakidah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan atas dasar kaidah, itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akidah dan konsep tersebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar dalam menghadapi proses perubahan dan guncangan-guncangan di tengah masyarakat.

2. Konsep yang berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah merupakan wahana dan tempat pengabdian yang jelas bagi PMII.
3. Konsep PMII merupakan organisasi Gerakan, Oleh karena itu PMII harus mampu menjalin hubungan antar organisasi atau masyarakat yang saling membutuhkan dalam hal saling memberikan nilai-nilai.

2.6. Deskripsi Sejarah berdirinya Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (IMM HMI PMII)

2.6.1. Sejarah Berdirinya Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Menurut (Abdul Halim Sani 2011:28-33) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan organisasi Mahasiswa Islam di Indonesia yang memiliki hubungan structural dengan organisasi Muhammadiyah dengan kedudukan sebagai organisasi otonom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1946 M, bertepatan dengan Tanggal 29 Syawal 1384 H. dipelopori Oleh tiga orang pemuda yaitu: Djasman Al-kind, Rosyad Sholeh, dan Soedibyo Markoes. IMM diresmikan oleh Pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketika itu diketahui oleh KH. Ahmad Badawi.

Kelahiran IMM juga merupakan respon atas persoalan-persoalan keumatan dalam sejarah bangsa ini pada awal kelahiran IMM, sehingga kehadiran IMM sebenarnya merupakan sebuah keharusan sejarah faktor-faktor problematis dalam persolan keumatan itu antara lain ialah sebagai berikut:

1. Situasi kehidupan bangsa yang tidak Stabil, pemerintahan yang otoriter dan serba tunggal, serta adanya ancaman komonisme di Indonesia
2. Terpecah belahnya umat islam dan dalam bentuk saling curiga dan fitnah, serta kehidupan politik umat islam yang semakin buruk
3. Terbingkai bingkainya kehidupan kampus (Mahasiswa) yang berorientasi pada kepentingan politik praktis
4. Melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya Akhlak dan semakin tumbuhnya materialisme-individualisme
5. Sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama dalam kampus, serta masih kuatnya suasana kehidupan kampus yang sekuler dan kemiskinan
6. Masih membekasnya ketertindasan imperialisme penjajahan dalam bentuk keterbelakang, kebodohan, dan kemiskinan.

Pada dasarnya IMM didirikan atas dua faktor integral yaitu faktor interen dan eksteren faktor interen dimaksudkan yaitu faktor yang terdapat didalam diri Muhammadiyah itu sendiri, sedangkan faktor eksteren adalah faktor yang berawal dari diri Muhammadiyah, khususnya umat islam di Indonesia dan pada umumnya apa yang terjadi di Indonesia. Faktor interen sebenarnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealisme, yaitu motif yang mengembangkan ideology muhammadiyah yaitu faham dan cita-cita muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah pada Hakikatnya adalah sebuah wadah organisasi yang mempunyai cita-cita atau tujuan untuk menegakan dan menunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang di ridhoi oleh allah swt. Hal ini termaksud dalam anggaran Muhammadiyah bab II pasal 3 dalam merefleksikan cita cita ini. Pada mulanya para mahasiswa yang bergabung atau mengikuti jejak langkah Muhammadiyah ini, oleh Muhammadiyah yang menganggapnya cukup

bergabung dengan organisasi otonom yang telah ada dalam hal ini yaitu Nasyyatul Aisyiyah (NA) bagi yang putri Mahasiswa dan pemuda muhammadiyah bagi yang mahasiswa.

Faktor eksteren, yaitu sebagaimana yang tersebut diatas baik yang terjadi ditubuh umat islam sendiri maupun yang terjadi dalam sejarah pergolakan bangsa Indonesia. Yang terjadi dimasyarakat Indonesia pada jaman dahulu hingga sekarang adalah sama saja, yaitu kebanyakan mereka masih mengutamakan budaya nenek moyang yang mencerminkan aktivis sekretistik dan bahkan anemistik yang bertolak belakang dengan ajaran islam murni Khususnya dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Hal semacam ini menimbulkan segnitifitasi yang begtiu besar utamanya pada kalangan mahasiswa yang memiliki kebebasan akademik dan seharusnya memiliki pola pikir yang jauh namun karena dampak budaya masyarakat yang sedemikian membumi, mereka akan menjadi jumud dengan mengalami kemunduran.

Kemudian tujuan akhir dari kehadiran ikatan mahasiswa muhammadiyah untuk pertama kalinya ialah membentuk akdemisiislama dalam rangka melaksanakan tujuan Muhammadiyah. Sedangkan aktivitas IMM pada awal kehadirannya yang paling menonjol ialah kegiatan kegiatan keagamaan dan perkaderan, sehingga seringkali IMM awal kelahirannya disebut sebagai kelompok pengajian mahasiswa Yogyakarta. Setelah berjalanya waktu IMM telah menjamur dan berkembang dikampus kampus yang notebenya Muhammadiyah diseluruh Indonesia, tidak hanya itu saja IMM telah didirikan oleh Mahasiswa Muhammadiyah yang kuliah kampus umum atau kampus yang bukan berbasis Muhammadiyah, seperti halnya kampus IAIN sunan Ampel Surabaya yang mayoritas Mahasiswa Nahdatul Ulama (NU) tetapi IMM telah ada bisa mewarnai kampus seperti organisasi lainnya. Adapun makasud secara umum didirikannya ikatan Mahasiswa Muhammadiyah antara lain adalah sebagai berikut: turut memelihara martabat dan membela kejayaan bangsa menegakan dan menjujung tinggi agama islam, sebagai upaya menopang,

melaksanakan, dan meneruskan cita cita pendiri Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsun dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah, dan membina meningkatkan dan memadukan iman dan ilmu serta amal dan dalam kehidupan bangsa umat dan persyarikatan.

Dengan misi dan visi gerakan IMM yang tertuang dalam Tri kompetensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah:

1. Keagamaan (religiusitas) sebagai organisasi kader yang berintikan nilai nilai religiusitas IMM senantiasa memberikan pembaharuan keagamaan menyangkut pemahaman pemikiran dan realisasinya. Menjadikan islam dalam setiap proses sebagi idealis sekaligus jiwa yang menggerakkan Motto indah yang harus diaktualisasikan adalah: dari islam kita berangkat (landasan dan semangat) dan kepada islam lah kita berproses sebagai cita cita.
2. Keintelektualan (intelektualitask dalam tataran intelektual IMM berproses untuk menjadi *centre of excellent*, pusat pusat keunggulan utama sisi intelektual organisasi ini diharapkan mampu menjadi sumber ide-ide pembaharuan.
3. Kemasyarakatan (Humanitas) perubahan tidak dapat terwujud hanya dengan segudang konsepsi. Yang tak kalah pentingya adalah perjuangan untuk mewujudkan idealitas (manifestasi gerakan).

2.6.2. Sejarah Berdirinya Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah merupakan organisasi Mahasiswa yang didirikan pada tanggal 5 februari 1947 tepat pada 15 rabiul awal 1366 H. oleh Lafran Pane beseta kawan kawanya Mahasiswa Sekolah tinggi islam (STI) yang sekarang menjadi Universitas islam Indonesia (UII). Bertujuan untuk mempertahankan Negara republic Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dalam menegakan ajaran agama islam. Kelahiran HMI tidak berangkat

dari ruang hampa, tapi dilandasi atau dilatar belakangi dengan situasi dan kondisi yang objektif. Situasi dan kondisi yang objektif tersebut meliputi:

1. Situasi dunia internasional

Kemunduran umat islam diawali dengan kemunduran berpikir, bahkan sama sekali menutup kesempatan untuk berpikir. Jelas ketika umat islam terlena dengan kesabaran dan keagungan masa lalu maka pada saat itu pula kemunduran menghadapi kita. Akibat dari keterlabelangan umat islam maka muncullah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran islam secara benar dan utuh. gerakan ini disebut gerakan pembaharuan yang ingin mengembalikan ajaran islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh kelompok ini, bahwa islam bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sacral saja melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran gerakan pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembaalikan ajaran islam kepada proporsi yang sebnarnya, yang berpedoman terhadap al- Qur'an dan Hadist Rasulullah saw.

2. Situasi Negara Indonesia

Pada saat itu Indonesia sedang mengalami revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah belanda, yang datang lagi dengan misi membawa peradaban barat dan hendak melanjutkan penjajahannya. Peradaban barat tersebut yang mempunyai ciri politik *secularism* dan ciri ekonomi *liberalisme*. Akhirnya bangsa Indonesia berjuang secara terus menerus dan atas rahmat allah swt maka pada tanggal 17 agustus 1945, soekarno-hatta sang dwi tunggal proklamasi atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan kemerdekaanya.

3. Kondisi umat islam

Kondisi umat islam sebelumnya berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi 4 golongan yaitu: pertama sebagian besar yang melakukan ajaran islam itu hanya sebagai kewajiban yang diadatkan seperti dalam upacara perkawinan, kematian serta kelahiran. Kedua: golongan alim ulama dan pengikut pengikutnya yang mengenal dan mempraktekan ajaran islam sesuai yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. Ketiga golongan alim ulama dan pengikut pengikutnya yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja, keempat golongan kecil yang memncoba menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama islam. Mereka berusaha supaya agama islam itu benar-benar dapat dipraktekan dalam masyarakat Indonesia. Pada saat itu islam itu ikut ambil bagian dalam konstelasi politik tepatnya pada, 3 november 1945 pemerintah mengeluarkan keputusan yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta yang memperbolehkan didirikanya partai partai organisasi.

4. Kondisi perguruan tinggi dan Kemahasiswaan

Ada dua faktor sangat dominan yang mewarnai perguruan tinggi (PT) dan dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri. Pertama sistem yang diterapkan dalam dunia pendidikan umum dan PT khususnya adalah sistem pendidikan barat, yang mengarah kepada sekularisme yang mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia” kedua adanya perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan serikat mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta dimana kedua organisasi dibawah pengaruh komonis. Bergabungya dua faham ini (sekuler dan komonis), melanda dunia PT dan kemahasiswaan menyebabkan timbulnya krisis keseimbangan yang sangat tajam yakni tidak hanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani serta pemenuhan antara kebutuhan dunia akhirat. Akibat dari penjajahan belanda tidak saja menimbulkan kerugian mental tapi juga spiritual bangsa Indonesia.

Pada 8 Maret 1947 berlangsung kongres Mahasiswa seluruh Indonesia yang berlangsung dimalang dimanfaatkan oleh HMI sebagai forum pengenalan dengan mahasiswa dari kota-kota ini. Kemudian beberapa bulan kemudian berdiri cabang cabang HMI Klaten, Solo dan malang pada 4-6 november 1947 pada kongres besar 1 pelajar islam Indonesia ponorogo lafran pane menjelaskan latar belakang dan tujuan HMI berdiri akhirnya HMI diterima kehadiran oleh umat islam dengan perjuangan HMI telah berkembang semakin besar dan mempunyai beberapa cabang cabang Indonesia Jogjakarta, Bandung, Jakarta, Malang, Solo, Palembang, Surabaya, dan lain lain. Sebab HMI merupakan organisasi yang berfungsi sebagi organisasi kader diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh allah swt.

2.6.3. Sejarah Berdirinya Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesian (PMII).

Pergerakan Mahasiswa islam indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen Mahasiswa yang terus bercita cita mewujudkan Indonesia kedepan menjadi yang lebih baik. Pergerakan mahasiswa islam Indonesia adalah anak cucu NU (nahdatul ulama) yang terlahir dari kandungan departemen perguruan tinggi ikatan pelajar Nahdatul ulama (IPNU) yang juga anak dari NU. PMII berdiri pada tanggal 17 April 1960 bertepatan dengan tanggal 21 syawal 2379 H. yang dijadikan hari lahirnya PMII yang diproklamasikan dibalai pemuda Surabaya dengan ketua umum H. Mahbub juaidi.

Latar belakang berdirinya PMII terkait dengan kondisi politik pada PEMILU 1955, berada diantara kekuatan politik yang ada yaitu MASYUMI, PNI, PKI, dan NU. Partai Masyumi yang diharapkan mampu untuk menggalang berbagai kekuatan umat islam pada saat itu ternyata

gagal serta adanya indikasi keterlibatan masyumi dalam pemberontakan pemerintah revolusioner republic Indonesia dan perjuangan semesta yang menimbulkan konflik antara soekarno dengan masyumi 1958 hal inilah yang kemudian membuat kalangan Mahasiswa NU gusar dan tidak enjoy beraktivitas HMI yang saat itu lebih dengan masyumi sehingga mahasiswa NU terinspirasi untuk mempunyai wadah tersendiri dibawah naungan NU dan disamping organisasi kemahasiswaan yang lain seperti HMI dengan MASYUMI, SEMMI, dengan PSII, IMM, GMNI, PNI. Hal-hal tersebut menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat dikalangan intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berydeologi *alhusunnah wajamaah*.

Proses kelahiran PMII terkait dengan perjalanan ikatan pelajar Nahdatul ulama (IPNU) yang lahir pada 24 februari 1954, dan bertujuan untuk mewadahi dan mendidik kader-kader NU demi meneruskan perjuangan NU. Namun dengan pertimbangan aspek psikologi dan intelektualitas para mahasiswa NU menginginkan sebuah wadah tersendiri. Sehingga berdirilah ikatan Mahasiswa Nahdatul ulama (IMANU) pada desember 1955 dijakarta yang dipelopori oleh Wa'il Haris Sugianto, dan sedangkan di surakarta berdiri KMNU (keluarga Mahasiswa nahdatul ulama) yang dipelopori oleh Mustahal ahmad. Namun keberadaan kedua organisasi mahasiswa tersebut tidak direstui bahkan ditentang oleh pimpinan pusat IPNU dan PBNU dengan alasan IPNU baru saja berdiri dua tahun sebelumnya IPNU punya kekhawatiran jika IMANU dan KMNU akan memperlemah eksistensi IPNU.

Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali pada muktamar II IPNU dipekalongan 1-5 januari 1957, gagasan ini pun kembali ditentang karena dianggap akan menjadi pesaing bagi IPNU sebagai langkah kompromis atas pertentangan tersebut maka pada muktamar III IPNU di Cirebon 27-31 desember 1958 dibentuk departemen perguruan tinggi IPNU yang diketuai oleh ismail makki Yogyakarta namun dalam perjalanannya antara IPNU dan departemen

terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program organisasi. hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang diterapkan oleh mahasiswa dan dengan pelajar yang menjadi pimpinan pusat IPNU, disamping mahasiswa itu para mahasiswa pun tidak bebas dalam melakukan sikap politik karena diawasi oleh PP IPNU oleh karena itu gagasan legalisasi organisasi mahasiswa NU senantiasa muncul dan mencapai puncaknya pada konferensi besar.

PMII pada awal berdirinya PMII sepenuhnya berada dibawah naungan NU, PMII merupakan perpanjangan tangan NU baik secara structural maupun fungsional. Selanjutnya sejak dasawarsa 70-an ketika rezim neo-fasis orde baru mulai menkerdilkan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, *dan issue back to campus* serta organisasi organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. Ketika dipergunakanya istilah independent dalam deklarasi murnajati tanggal 14 juli 1972 dimalang dalam musiyawarah besar (MUBES) seolah telah terjadi pembelahan diri anak ragil NU dari induknya. Sebagai perwujudan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Dengan kesadaran sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengembang misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengembang komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk. menurut (alfas, 2009:56-59).

2.6.4. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini dengan judul “Gerakan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) dalam meneguhkan identitas kewargaan diKabupaten Ponorogo”, memiliki kemiripan penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaefuddin Ahrom Al Ayubbi (2015) dengan judul Organisasi Ekstra Kampus dan Kepemimpinan Mahasiswa Prespektif Sosiologis (Studi Kaderisasi Pada PMII, HMI, dan KAMMI di UIN Sunan Kalijaga). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) pola kaderisasi organisasi ekstra kampus PMII, HMI, dan KAMMI di UIN Sunan Kalijaga menggunakan agenda rekrutmen, pelatihan, dan diskusi-diskusi, (2) kaderisasi dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, (3) bidikan organisasi ekstra kampus dalam agenda kaderisasi ialah interaksi sosial atau kesadaran sosial dan membentuk karakter serta jiwa kepemimpinan mahasiswa atau kader, (4) masing-masing organisasi ekstra kampus, PMII, HMI dan KAMMI memiliki materi-materi tentang kesadaran sosial (interaksi sosial) dan kepemimpinan yang dirumuskan melalui rapat kerja anggota organisasi, dan (5) agenda kaderisasi organisasi PMII, HMI dan KAMMI berkontribusi dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter dikalangan mahasiswa.
2. Penelitian dari Ginanjar Gesang Bayu Bisma (2017) dengan judul Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Islam di Universitas Airlangga (Pandangan Tentang Wacana Prospek Demokrasi Dan Relasi Negara Agama). Penelitian ini mengungkap beberapa persoalan terkait dengan pandangan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) islam di Universitas Airlangga terkait wacana demokrasi serta relasi antara Negara dan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ormek Islam di Universitas Airlangga mempunyai sumbangsih besar terhadap distribusi wacana, pergolakan ideologi, dan praktik demokratisasi. Proses kaderisasi, pendistribusian isu aktual dan penanaman ideology menjadi strategi ormek dalam menjalankan perannya.

3. Penelitian dari Lukman Amin (2014) dengan judul Gerakan Demokrasi Deliberatif Organisasi Ekstra Kampus Unesa. Pelaksanaan demokratisasi dinegeri ini memerlukan respon dan kepekaan dari masyarakat tentang posisi masyarakat sebagai actor dalam sistem ini. Salah satu yang harus diperkuat adalah masalah civil society. Gerakan mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi yang berlangsung dinegara ini Mahasiswa sebagai wujud partisipasi dalam



Menentukan arah pendulum kepemimpinan Negara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam menjalankan setiap gerakannya organisasi ekstra kampus selalu melalui proses pembentukan ruang publik. Pembentukan ruang publik ini dijalankan untuk membangun suatu opini mahasiswa terkait suatu permasalahan diranah kampus yang perlu mendapat respon dari arus bawah dan merupakan proses awal demokrasi deliberatif. Selain itu, ruang publik organisasi ekstra kampus UNESA, ruang publik menjadi sarana komunikasi antar mahasiswa dalam membahas setiap problematika diranah kampus yang perlu mendapatkan tanggapan secara langsung dan memiliki bentuk yang berbeda-beda setiap organisasi ekstra kampus.

2.6.5. Kerangka Pikir

Penelitian ini ingin melihat "gerakan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) dalam meneguhkan identitas kewargaan (IMM, HMI, PMII Kabupaten Ponorogo). Dengan menggunakan teori Kristian Stokke dalam Eric Hiariej, *dkk.* (2018) maka politik kewargaan mencakup upaya-upaya memperjuangkan keanggotaan, hak-hak dan partisipasi. Seperti yang akan diuraikan dalam kasus perkembangan kewargaan di Indonesia, memperjuangkan dimensi dimensi kewargaan yang tampil dalam bentuk gerakan- gerakan nasionalisme dan politik identitas; gerakan-gerakan yang memperjuangkan keadilan dan redistribusi kesejahteraan dan gerakan-gerakan pro-demokrasi.

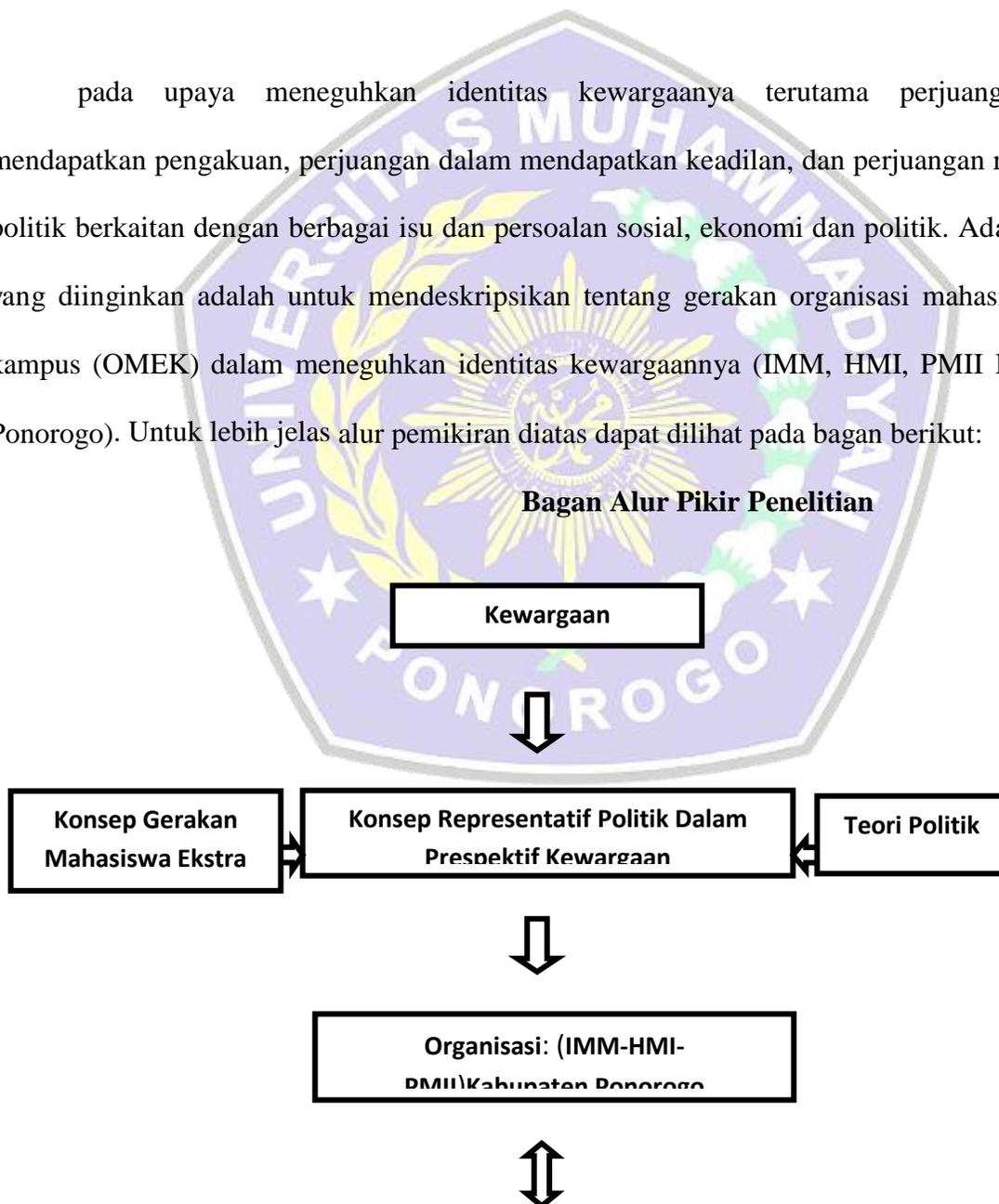


Gerakan mahasiswa merupakan sebuah perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses dealektika panjang setiap negara, khususnya Kabupaten Ponorogo. Keikutsertaan mahasiswa dalam mengontrol hingga proses perubahan dari setiap gerak perjalanan bangsa merupakan sebuah lukisan yang tidak dapat dihilangkan dari memori sejarah bangsa. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa mendapatkan tugas nurani untuk selalu bertanggung jawab atas situasi sosial, ekonomi dan politik bangsa. Gerakan mahasiswa bisa terjadi didalam kampus atau bisa diluar kampus. Hanya saja memang tidak perlu semua mahasiswa terlibat. Pada umumnya, para aktivis mahasiswa lah yang bergerak.

Mahasiswa disamping mempunyai tugas belajar, juga mengemban fungsi lain, sebagai unsur dari kehidupan masyarakat yang dinamik dan sedang menuju kehidupan modern, mahasiswa merupakan golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang sama seperti golongan lainnya. Kehadiran gerakan mahasiswa di Kabupaten Ponorogo sebagai perpanjangan

aspirasi rakyat sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat khususnya kaum akademisi dan perlawanan atas kapitalisasi pendidikan. Secara umum, perlawanan yang dilakukan lebih ditunjukkan pada upaya penguatan posisi tawar mahasiswa maupun tuntutan-tuntutan atas sebaiknya disempurnakan berbagai bentuk penyimpangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara Dalam perannya yang demikian, maka gerakan perlawanan mahasiswa diorientasikan

pada upaya meneguhkan identitas kewargaannya terutama perjuangan dalam mendapatkan pengakuan, perjuangan dalam mendapatkan keadilan, dan perjuangan representasi politik berkaitan dengan berbagai isu dan persoalan sosial, ekonomi dan politik. Adapun tujuan yang diinginkan adalah untuk mendeskripsikan tentang gerakan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) dalam meneguhkan identitas kewargaannya (IMM, HMI, PMII Kabupaten Ponorogo). Untuk lebih jelas alur pemikiran diatas dapat dilihat pada bagan berikut:



1. Gerakan memperjuangkan keanggotaan, hak dan partisipasi
2. Gerakan nasionalisme
3. Gerakan keadilan sosial
4. Gerakan pro-demokrasi

Kristian Stokka dalam Eric Hiariej, *dkk* (2018)

Gambar 1: kerangka pemikiran

